
DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TERHADAP DEMOKRASI: TINJAUAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024

Oleh

Zamhasari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrah, Pekanbaru

Email: zamhasari@univrab.ac.id

Article History:

Received: 27-02-2024

Revised: 13-03-2024

Accepted: 30-03-2024

Keywords:

Concurrent Elections,
Democracy, Advantages,
Disadvantages

Abstract: *General Elections are a fundamental element in a democratic system, functioning as a formal mechanism for the people to express their will and elect leaders and representatives. However, the mere existence of elections is not sufficient to ensure that a country is truly democratic. Democratic elections ensure that all citizens have equal voting rights and that the election process is conducted transparently, without coercion, manipulation, or fraud. This study not only uses a survey method to collect data, but also involves interventions in data collection through questionnaires, tests, and interviews. The main objective of this research is to explore the advantages and disadvantages of the implementation of the Concurrent Regional Head Elections in 2024 and to analyze its impact on the quality of democracy in the region. The researcher adopts David Held's Participatory Democracy Theory (1987), which emphasizes the importance of active citizen participation in the political process as a fundamental basis for a healthy democracy. The results of this study are expected to provide deeper insights into how Concurrent Elections affects the dynamics of democracy in Indonesia and offer recommendations to improve the quality of political participation in the future*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar penting dari demokrasi, tetapi tidak cukup hanya dengan adanya pemilu untuk membuktikan bahwa suatu bangsa demokratis. Demokrasi yang sejati memerlukan pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif, didukung oleh institusi yang kuat, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan budaya politik yang demokratis. Tanpa unsur-unsur ini, pemilu bisa menjadi sekadar formalitas tanpa substansi demokratis yang sejati. Pemilu memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil mereka yang merupakan inti dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, dan pemilu adalah cara utama untuk mengekspresikan kehendak rakyat tersebut.

Melalui pemilu, pemimpin dan wakil rakyat dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Mereka yang terpilih harus menjalankan amanah dengan baik, atau mereka bisa kehilangan posisi dalam pemilu berikutnya. Pemilu menyediakan mekanisme partisipasi politik yang formal dan damai bagi warga negara, memungkinkan mereka untuk berperan serta dalam proses politik. Agar pemilu benar-benar menjadi bukti demokrasi, pemilu tersebut harus bebas dan adil. Ini berarti semua warga negara memiliki hak suara yang sama, proses pemilu transparan, dan tidak ada tekanan, manipulasi, atau kecurangan dalam proses pemilu.

Dalam perkembangannya, praktek demokrasi di era modern sudah tidak memungkinkan lagi dijalankan secara langsung, dalam arti seluruh rakyat berkumpul untuk membuat keputusan dan seluruh rakyat bersama-sama menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu muncul demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan Negara dan memilih pejabat yang akan menjalankan keputusan tersebut baik di tingkat pusat maupun di daerah (Arrsa, 2014). Demokrasi mensyaratkan adanya persaingan yang sehat antar kandidat dan partai politik, yang memberikan pilihan yang nyata bagi pemilih. Pemilu yang demokratis harus menjamin bahwa hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat, dilindungi. Tanpa ini, pemilu dapat menjadi alat legitimasi bagi otoritarianisme.

Demokrasi yang sejati tidak hanya bergantung pada keberadaan pemilu, tetapi juga pada kekuatan dan independensi institusi demokrasi seperti peradilan, media, dan lembaga pengawas pemilu. Institusi ini harus dapat berfungsi tanpa campur tangan politik untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan dengan benar. Demokrasi memerlukan budaya politik yang mendukung, di mana nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap proses demokratis dijunjung tinggi oleh masyarakat dan pemimpinnya. Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan konstitusi yang adil, yang menjamin hak-hak politik dan sipil bagi semua warga negara. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah (Nabila, 2021).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian ini menggunakan metode survey, dimana survey ini digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, peneliti juga melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner, tes, dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti memandang adanya kebutuhan akademis untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tahun 2024, dan apa pula dampak Pilkada serentak tersebut terhadap demokrasi?

Peneliti menggunakan Teori Demokrasi Partisipatif David Held (1987), dimana teori ini menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik sebagai inti dari demokrasi yang sehat. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme utama yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin mereka. Semakin tinggi partisipasi pemilih dalam Pilkada, semakin kuat legitimasi demokrasi di daerah tersebut. Tingginya partisipasi dalam Pilkada dapat meningkatkan

kualitas demokrasi, karena menunjukkan bahwa warga negara terlibat aktif dalam proses politik. Namun, jika partisipasi rendah atau jika pemilih terpolarisasi secara tajam oleh isu-isu identitas, kualitas demokrasi bisa terancam karena dapat menyebabkan fragmentasi sosial dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan system pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat (Hapsari & Saraswati, 2023). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia merupakan upaya untuk menyelaraskan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah dalam satu periode waktu yang sama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemilihan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal (Gai & Tokan, 2020). Implikasi yang diharapkan dari adanya pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan pemilu disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem partai politik dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem partai politik dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Solihah, 2018).

Pemilu Serentak

Di Indonesia saat ini, menggunakan sistem pemilu berkala, yaitu antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terpisah dengan pemilu presiden dan wakil presiden, ditambah dengan pemilu kepala daerah. Alasannya, menurut Assiddiqie, yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat merubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik (Prasetyoningsih, 2014).

Kelebihan Pilkada Serentak

Pilkada serentak seharusnya bisa menekan biaya penyelenggaraan pemilu yang selama ini boros. Salah satu indikator pilkada serentak akan efisien apabila waktu penyelenggaraan gubernur, bupati, walikota adalah sama. Memang tidak mudah membuat pilkada serentak, konsekuensinya ada beberapa kepala daerah yang dipotong masa jabatannya, nanti akan ada resistensi dari kepala daerah lainnya, dan pada akhirnya bisa menjadi polemik (Chaniago, 2016).

Mengacu kepada Teori Demokrasi Partisipatif yang dikembangkan oleh David Held (1987), dimana teori tersebut menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik, maka setidaknya Pilkada serentak ini memiliki beberapa kelebihan: (1)

Efisiensi Biaya, dengan menggabungkan pemilihan di berbagai daerah dalam satu waktu, biaya operasional seperti logistik, pengamanan, dan administrasi bisa lebih hemat. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada juga dapat dioptimalkan; (2) Peningkatan Partisipasi Politik, Pilkada serentak dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat karena mereka lebih fokus pada satu momentum besar pemilihan, yang pada gilirannya bisa mendorong tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi; (3) Penguatan Stabilitas Politik, dengan mengadakan Pilkada secara serentak, transisi kepemimpinan di berbagai daerah dapat berlangsung secara bersamaan, yang bisa mengurangi potensi ketidakstabilan politik yang berkepanjangan akibat proses pemilihan yang terpecah-pecah waktunya; (4) Konsistensi Kebijakan Nasional, pilkada serentak memungkinkan pemerintahan pusat dan daerah untuk lebih mudah menyelaraskan kebijakan, terutama dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antara pusat dan daerah; (5) Pengawasan yang Lebih Efektif, pemilihan serentak memudahkan lembaga pengawas seperti Bawaslu untuk mengawasi proses pemilihan di seluruh daerah secara lebih terstruktur dan terkoordinasi, yang diharapkan dapat meminimalisasi kecurangan.

Kekurangan Pilkada Serentak

Dibalik kelebihan Pilkada serentak itu, tentu ada pula beberapa kekurangan dari Pilkada serentak ini. Diantara kekurangannya adalah: (1) Beban Kerja yang Berat bagi Penyelenggara, dengan banyaknya daerah yang melakukan pemilihan secara bersamaan, beban kerja bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, aparat keamanan) meningkat secara signifikan, yang bisa berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu; (2) Risiko Konflik Politik yang Meluas, jika terjadi ketegangan atau konflik politik di satu daerah, konflik tersebut bisa dengan cepat menyebar ke daerah lain yang juga sedang melaksanakan pemilihan, mengingat tingginya perhatian publik pada Pilkada serentak; (3) Kesulitan dalam Sosialisasi dan Edukasi Pemilih, karena pemilihan dilakukan secara serentak, kampanye dan sosialisasi calon kepala daerah bisa mengalami kendala. Pemilih mungkin kesulitan mengenali dan memahami semua calon di berbagai tingkatan (gubernur, bupati, wali kota) karena informasi yang harus diserap terlalu banyak dalam waktu yang bersamaan; (4) Potensi Ketidakmerataan Kualitas Pilkada, dengan jumlah daerah yang sangat banyak, kualitas pelaksanaan Pilkada di setiap daerah bisa bervariasi. Daerah yang kurang siap atau kurang sumber daya mungkin mengalami masalah dalam pelaksanaan yang bisa memengaruhi hasil Pilkada; (5) Tekanan dan Ketegangan Politik yang Tinggi, Pemilihan serentak dapat meningkatkan intensitas persaingan politik di berbagai daerah, yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik lebih tinggi daripada jika Pilkada dilakukan secara terpisah.

Diagram Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak di Indonesia

Dari diagram tersebut terlihat bahwa ada beberapa aspek di mana Pilkada serentak memberikan manfaat yang besar seperti efisiensi biaya dan peningkatan partisipasi politik, namun juga ada kekurangan yang signifikan seperti risiko konflik politik meluas dan beban kerja yang berat bagi penyelenggara.

Pilkada serentak memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal efisiensi dan konsistensi kebijakan. Namun, tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam hal kesiapan teknis dan sosial, memerlukan perhatian dan penanganan yang serius agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan demokratis.

Sejumlah bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran suatu pemilu. Terkait perilaku pemilih, banyak sarjana ilmu politik menaruh perhatian pada pengaruh pemilu serentak pada partisipasi pemilih. Penerapan sistem pemilu serentak diperkirakan akan meningkatkan tingkat kehadiran pemilih di kotak suara. Ekspektasi ini didasarkan pada dua argumen utama, (1) meningkatnya jumlah kompetisi akibat digabungkannya beberapa pemilu secara serentak akan meningkatkan pemberitaan media dan berdampak pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan pemilu; (2) karena "biaya" yang harus ditanggung pemilih untuk pergi ke kotak suara bersifat tetap, terlepas dari berapapun jumlah pemilihan yang diselenggarakan (Tjenreng, 2020).

Tabel Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak

Kategori	Kelebihan	Kekurangan
Efisiensi Biaya	4	
Peningkatan Partisipasi Politik	4	
Penguatan Stabilitas Politik	3	
Konsistensi Kebijakan Nasional	3	
Pengawasan yang Lebih Efektif	2	
Beban Kerja yang Berat		3
Risiko Konflik Politik Meluas		4
Kesulitan Sosialisasi		4
Ketidakmerataan Kualitas		3

Tekanan Politik Tinggi		3
------------------------	--	---

Skala Dampak: Skala ini menggunakan angka 1-5, di mana 5 menunjukkan dampak yang sangat signifikan dan 1 menunjukkan dampak yang minimal.

Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya, sebab Pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada tersebut menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Perlu diperhatikan juga masalah-masalah keamanan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional, karena dalam prakteknya sekarang ini sering kali pilkada menimbulkan konflik horizontal yang cukup masif antar pendukung masing-masing calon, sebagai akibat tidak puasnya para pendukung terhadap hasil pilkada tersebut (Syafuruddin & Hasanah, 2022). Dalam menghadapi Pilkada serentak ini, perlu kiranya membangun budaya politik yang lebih baik dan bermartabat dalam rangka mengefektifkan partisipasi politik warga negara (Simamora, 2014).

Demokrasi memang bukan sistem yang murah termasuk untuk membiayai pemilu, negaranegara lainnya yang menganut demokrasi juga mengalaminya. Pemilu serentak diharapkan bukan hanya instrumen yang mekanistik dan teknokratis, tetapi juga bagian dari pendidikan politik sebagai solusi atas apatisisme publik yang terjadi. Pilkada serentak adalah medan kontestasi politik dengan seperangkat aturan main yang tidak secara otomatis menghasilkan figur-figur pemimpin yang transformasional. Oleh karenanya, publik harus memiliki kapasitas berdemokrasi untuk melakukan penyaringan para elit tersebut. Pemilu serentak secara langsung merupakan anak kandung dari gerakan reformasi tentu masih banyak menyisakan persoalan, namun tetap melangkah dan melakukan perbaikan melalui regulasi pilkada merupakan sebuah proses yang baik (Sholikin, 2019).

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Pilkada serentak merupakan langkah progresif dalam evolusi demokrasi Indonesia yang berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan semua pemangku kepentingan dalam mengelola proses tersebut dengan efektif, transparan, dan adil. Dengan perhatian dan upaya yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada, Pilkada serentak dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih matang dan responsif terhadap kebutuhan rakyat Indonesia. Pilkada serentak telah menunjukkan manfaat signifikan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, tetapi juga menghadirkan tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius agar tidak mengganggu stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arrisa, R. C. (2014). Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- [2] Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196-211.

-
- [3] Gai, A., & Tokan, F. B. (2020). Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 109-128.
 - [4] Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70-84.
 - [5] Held, David (1987) *Models of Democracy*. Polity Press, Cambridge.
 - [6] NABILA, W. S. (2021). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia.
 - [7] Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.
 - [8] Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87-108.
 - [9] Simamora, J. (2014). Menyongsong rezim pemilu serentak. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 21.
 - [10] Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
 - [11] Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 252-269.
 - [12] Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN